



**RANCANGAN AWAL
RENCANA KERJA (RENJA)
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
KECAMATAN PURWAREJA KLAMPOK**

Jl. Raya No.42 Purwareja Klampok Telp. (0286) 479002

<http://banjarnegarakab.go.id> Surat Elektronik

kec_purwarejaklampok@banjarnegarakab.go.id

Kode Pos 53474

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kenikmatan kepada kita sekalian, kemudahan dalam pelaksanaan penyusunan dan pembuatan Rancangan Akhir Renja Tahun 2023 Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara.

Penyusunan Rancangan Akhir Renja Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 terdiri dari Pendahuluan, Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah serta Penutup. Penyusunan Rancangan Awal Renja tersebut berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah.

Demikian Rancangan Akhiur Renja Tahun 2023 Kecamatan Purwareja Klampok disusun, dengan harapan dapat untuk menjadi acuan rencana kerja perangkat daerah dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Purwareja Klampok, Maret 2023

CAMAT PURWAREJA KLAMPOK



SONHAJI, S.I.P. S.Sos.M.Kes
Pembina Tk.I

NIP. 19660626 198702 1 002

DAFTAR ISI

Contents

DAFTAR ISI.....2

BAB I PENDAHULUAN3

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN
LALU12

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH45

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH49

BAB V PENUTUP51

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Banjarnegara Nomor Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 286);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 233);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
26. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026

(Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 14);

27. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 15);
28. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 Nomor).

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk:

- a. Menjabarkan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 ke dalam rencana program kegiatan prioritas Tahun 2024 yang diselaraskan dengan sasaran dan program Renja K/L Tahun 2024 dan Renja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024;
- b. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah melalui penerapan anggaran berbasis kinerja.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Menjadi pedoman dalam menyusun RKA-DPA dalam Rancangan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2024, yang dalam penyusunannya didahului dengan menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024;
- b. Sebagai instrumen evaluasi dan pengendalian program dan kegiatan Tahun 2024;

- c. Menjadi media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun berdasarkan sistematika yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah, serta sistematika dokumen Renja Perangkat Daerah.

BAB 2 : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dan review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dan atau pokok-pokok DPRD.

BAB 3 : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, serta program dan kegiatan tahun 2024.

BAB 4 : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah dan sasaran RKPD.

BAB 5 : PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 disusun untuk menjawab permasalahan dan isu-isu strategis Kabupaten Banjarnegara yang berkaitan dengan urusan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Urusan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah meliputi urusan Pemerintahan fungsi penunjang kewilayahan.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 terdiri dari 4 program, 9 kegiatan, dan 21 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 2.121.773.235,-, dengan fokus utama pada membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dan tugas yang dilimpahkan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Program/kegiatan/sub kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan pembangunan daerah yang meliputi:

- a. Belum optimalnya etos kerja, budaya kerja dan disiplin kerja pegawai;
- b. Masih kurangnya dukungan data informasi dari masyarakat , peraturan yang valid, akurat dan terintegrasi sebagai pedoman dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat;
- c. Masih rendahnya keselarasan dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang ada;
- d. Apatisme masyarakat dalam mengikuti musrenbang;

- e. Masih rendahnya pemahaman masyarakat maupun aparatur desa tentang hakekat pembangunan nasional;
- f. Masih rendahnya kapasitas aparatur desa dalam melaksanakan tertib administrasi pemerintahan desa;
- g. Masih kurangnya keseriusan masyarakat dan petugas pemungut dalam pelunasan PBB lebih awal;
- h. Tahun 2020 di seluruh wilayah Indonesia umumnya dan di Kecamatan Purwareja Klampok pada khususnya, sangat terdampak dengan adanya pandemi virus covid19 yang telah merubah dan mengganggu semua lini kehidupan.

Dari 3 program, 8 kegiatan, dan 17 sub kegiatan yang ada dalam Renja Perangkat Daerah tersebut, program/kegiatan/sub kegiatan yang disetujui untuk dianggarkan dalam APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2022 terdiri dari 3 program, 8 kegiatan, dan 17 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 2.230.426.004,-

Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022, terjadi beberapa perubahan yang meliputi penambahan atau pengurangan pagu, penghapusan, penambahan atau pengurangan program/kegiatan/sub kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. Perubahan tersebut mengubah rincian dalam Renja Perangkat Daerah menjadi 4 program, 9 kegiatan, dan 21 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 2.287.208.485,- Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun 2022, program/kegiatan/subkegiatan yang bertambah meliputi 1 Program yaitu Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, 1 Kegiatan yaitu Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, 4 Sub Kegiatan.

Dinamika yang terjadi selama tahun 2022 turut mempengaruhi keberhasilan pencapaian Renja Perangkat Daerah. Dalam pelaksanaan APBD Tahun 2022, tercatat adanya hasil yang

baik yang dikarenakan adanya pencapaian maupun pelampauan target maupun yang tidak memenuhi target.

- a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tidak ada.

- b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan meliputi Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa sedangkan realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Sub Kegiatan Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Perencanaan target kinerja yang sesuai;
2. Penyelarasan hal-hal yang akan dikerjakan dengan target kinerja;
3. Penyelarasan apa yang dianggarkan dengan apa yang akan dikerjakan;
4. Pengerjaan kegiatan sesuai dengan rencana kerja;
5. Pelaporan capaian kinerja selaras dengan apa yang telah dilaksanakan dan direncanakan sebelumnya.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, maka masih banyak yang harus di perhatikan dan ditingkatkan kinerjanya agar sesuai dengan indikator kinerja.

Pada tahun perencanaan selanjutnya, perlu diambil kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, diantaranya:

1. Koordinasi yang baik antara masing – masing Kasi dan Kasubag
2. Prioritas Perencanaan yang tepat sasaran, agar kegiatan bisa berjalan sesuai perencanaan
3. Adanya anggaran yang mendukung kegiatan

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2022 disajikan pada tabel di bawah ini:

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah
Tabel 2.1
s.d. Tahun 2022* Kabupaten Banjarnegara

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
	Urusan Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Kewilayahan									
		Nilai SKM	84,35	88,05	87	88,05	100%	84,34	86,81	100%
	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	Nilai SAKIP	CC	B	CC	B	B	CC	CC	CC

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		Listrik yang Disediakan																	
	Penyedia jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 laporan	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100 %					
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %					

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	naan Pemban gunan di Desa											
	PROGRAM PENYELEN GGARAAN URUSAN PEMERINT AHAN UMUM	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Penyelengg araan Urusan Pemerintah an Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Pelaksanaa	1 dokumen	1 dokumen	1	1 dokumen	1	1 dokumen	1	1	1	1	1

		asan pemerin tahan desa																	
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokume n yang Difasilita si dalam rangka Penyusu nan Peratura n Desa dan Peratura n Kepala Desa	4 dokumen	8 desa	8 desa	8 desa	8 desa	8 desa	8 desa	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100 %					
	Fasilitasi administrasi tata pemerintah n desa	Jumlah Dokume n yang Difasilita si dalam rangka Adminis trasi Tata Pemerint ahan	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	100 %						

[illegible]

[illegible]

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan pelayanannya, Perangkat Daerah mengampu 3 Indikator. Dari 3 indikator tersebut, 3 berstatus tercapai dan 0 indikator berstatus tidak tercapai. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian tersebut antara lain adalah :

1. Merencanakan target kinerja;
2. Menyelaraskan hal-hal yang akan dikerjakan dengan target kinerja;
3. Menyelaraskan apa yang dianggarkan dengan apa yang akan dikerjakan;
4. Mengerjakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja;
5. Melaporkan capaian kinerja selaras dengan apa yang telah dilaksanakan dan direncanakan sebelumnya.

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK LPPD	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Nilai IKM	-	-	86	87	84,34	84,35	90,16	88,05	88	88	
	Nilai SAKIP	-	-	CC	B	CC	CC	C	B	B	B	
	Persentase Realisasi SPPT PBB	-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	-	-	

*) Kolom 3 diisi berdasarkan IKK outcome dalam lampiran Permendagri 18/202

capaian indikator lainnya. Beberapa dampak dari adanya permasalahan dan hambatan tersebut meliputi:

1. Kurang tercapainya suatu kegiatan sesuai indikator kinerja
2. Tidak tercapainya sasaran kerja
3. Tidak optimalnya hasil pekerjaan

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi, peningkatan kualitas birokrasi, dan meningkatnya ekspektasi pemangku kepentingan pengguna layanan akan meningkatkan kebutuhan akan adanya penyediaan produk layanan yang semakin baik. Oleh karena itu, diperlukan inovasi-inovasi dalam menunjang peningkatan pelayanan publik secara kontinyu. Beberapa tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, yaitu:

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi sehingga pelayanan kepada Masyarakat belum Optimal
2. Fasilitas yang belum terpenuhi diantaranya anggaran yang mendukung suatu kegiatan
3. Regulasi yang jelas sebagai dasar atau payung hukum sehingga suatu kegiatan dapat di laksanakan.
4. Kebijakan – kebijakan yang bersifat mendesak yang mengakibatkan peralihan anggaran ,sehingga rencana kerja tidak dapat tercapai sesuai ketentuan.

Berdasarkan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangn tersebut, dapat diinventarisasi beberapa isu strategis. Inventarisasi isu-isu strategis tahun 2024 didapatkan dari hasil analisis kondisi internal dan eksternal Kabupaten Banjarnegara sampai dengan tahun 2022. Isu-isu strategis ini berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi, pemanfaatan potensi dan masalah keberlangsungan pembangunan. Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2024, sebagai berikut:

1. Masih lemahnya pemahaman aparatatur terhadap tupoksi dan koordinasi antar seksi dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
2. Masih Terbatasnya kualitas dan kuantitas pegawai di kecamatan.
3. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana baik secara kualitas maupun kuantitas.
4. Belum optimalnya kemampuan SDM perangkat desa dalam penyelenggaraan tertib administrasi desa.
5. Belum optimalnya kesadaran aparatatur pemerintah desa dalam memenuhi kewajiban terkait pelunasan PBB.
6. Belum optimalnya kemampuan perangkat desa dalam penatausahaan keuangan desa terkait dengan implementasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.
7. Belum optimalnya kesadaran aparatatur pemerintahan desa dalam melakukan implementasi (tidak sesuai dengan juknis)

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD Tahun 2024 merupakan pelaksanaan tahun terakhir RPD Tahun 2023-2026. Dalam RPD Tahun 2023-2026, prioritas arah kebijakan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2026 meliputi:

1. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan
2. Mengkoordinasikan pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
3. Mengkoordinasikan tugas yang dilimpahkan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Berdasarkan rancangan awal RKPD Tahun 2024, terdapat beberapa hal yang menjadi catatan yaitu:

- 1.
- 2.
- 3.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan musrenbang kecamatan dan forum konsultasi publik telah disampaikan usulan program dan kegiatan masyarakat melalui aplikasi SIPD. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2024 Kabupaten Banjarnegara

No	Usulan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi (Desa/Kelura han)	Volume	Pagu	Perangkat Daerah Tujuan
1	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Sirkandi	1 ls	50.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Pendidikan: Pemeliharaan sarana dan prasarana PAUD/Taman KanakKanak/Taman Pendidikan Al Qur'an/Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an/TPQ/Madrasah Non Formal)	Kaliwinasuh	1 unit	200.000.000	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
3	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan sarana jalan desa (gorong-gorong, selokan, box/slab curvert, drainase, prasarana jalan lainnya))	Kalilandak	730 m	185.000.000	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
4	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Pendidikan: Pemeliharaan sarana dan prasarana PAUD/Taman KanakKanak/Taman Pendidikan Al Qur'an/Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an/TPQ/Madrasah Non Formal)	Pagak	1 unit	100.000.000	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
5	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Pemeliharaan Jembatan Milik Desa)	Kaliwinasuh	1 unit	150.000.000	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah

6	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah (Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jalan desa)	Kaliwinasuh	300 m	200.000.000	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
---	---	-------------	-------	-------------	---

2.6. Penelaahan Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Berdasarkan hasil reses anggota DPRD, melalui aplikasi SIPD telah disampaikan usulan program dan kegiatan. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Banjarnegara

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Validasi
	NIHIL				

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

1. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing, dengan program prioritas sebagai berikut :
 - a. Perlindungan sosial dan penguatan tata kelola kependudukan;
 - b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
 - c. Peningkatan produktivitas dan daya saing.
2. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, dengan program prioritas sebagai berikut :
 - a. Revolusi mental dan pembinaan ideologi pancasila;
 - b. Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan;
 - c. Memperkuat moderasi beragama;
 - d. Meningkatkan budaya literasi, inovasi dan kreativitas.
3. Memperkuat stabilitas polhukam dan transformasi pelayanan publik, dengan program prioritas sebagai berikut :
 - a. Konsolidasi demokrasi;
 - b. Penegakan hukum nasional;
 - c. Reformasi birokrasi dan tata kelola; dan
 - d. Menjaga stabilitas keamanan nasional

Rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahun 2023 dijabarkan ke dalam semua urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten Banjarnegara, untuk kecamatan adalah :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 6 Kegiatan dan 18 sub kegiatan.
- b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terdiri dari 2 kegiatan yang diarahkan pada 1)Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat. Dengan 3 sub kegiatan yaitu Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha, Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perijinan, Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan dan 2)Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum dengan 1 sub kegiatan yaitu Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum.
- c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan
- d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum terdiri dari 1 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah. Dengan 1 sub kegiatan yaitu Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.
- e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terdiri dari 1 Kegiatan dan 7 Sub Kegiatan

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan dokumen RPD Kabupaten Banjarnegara 2023-2026, Visi yang diusung adalah Kabupaten Banjarnegara Maju Berbasis Pertanian dan Misi dalam RPJPD Tahun 2005-2025 yang

menjadi bagian tak terpisahkan dalam pencapaian visi misi Kepala Daerah sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Purwareja Klampok sebagai salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara dari lima misi tersebut adalah **Misi Ketiga** yaitu :

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam kehidupan politik yang demokratis dan bertanggung jawab yang ditandai dengan meningkatnya partisipasi dan kesadaran politik masyarakat terutama menyangkut hak dan kewajiban warga negara serta institusionalisasi partai politik dalam kegiatan politik, meningkatnya profesionalisme aparatur daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, beretika, dan bertanggung jawab, serta mampu mendukung pembangunan daerah yang bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar mutu pelayanan yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat, meningkatnya perkembangan sistem dan iklim demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik yang dapat diukur dengan adanya pemerintahan yang berdasarkan hukum, birokrasi yang profesional dan netral, dan masyarakat yang mandiri, Meningkatnya kemampuan dan kemandirian daerah dalam mendukung pembangunan daerah, menguatnya kelembagaan lokal yang mampu mengakomodasi tuntutan perubahan dan berperan aktif dalam pembangunan daerah, serta meningkatnya hubungan kerja sama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak pada tingkat lokal, nasional, dan internasional.

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan aparatur pemerintah yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-

2026 dan RENSTRA Kecamatan Purwareja Klampok Tahun 2023-2026. Kecamatan Purwareja Klampok menetapkan Rencana Strategis Tahun 2023-2026 sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Purwareja Klampok dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2023-2026.

Reformasi pada sektor aparatur daerah pada hakekatnya merupakan tindakan atau kegiatan pembaharuan secara konsepsional, sistematis, dan berkelanjutan. Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi **visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program** yang ingin diwujudkan.

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Terlampir

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Purworeja Klampok
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Purworeja Klampok

Kode				Unsur/ Bidang urusan/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi output kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target capaian kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok ukur	Target	
				UNSUR KEWILAYAHAN												3.766.214.720	
		01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentas e terlaksana nya program penunjang urusan pemerinta han daerah/kota	100%	Kec. Purwareja Klampok	100%						Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah/kota	100%	3.303.714.720	
		01	201	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Terlaksana nya Perencana an, Pengangg aran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	100%	Kec. Purwareja Klampok						DAU	7.000.000	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	100%	8.000.000
		01	201	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Tersusun nya Dokumen Perencana an Perangkat Daerah	8 dokumen	Kec. Purwareja Klampok		Jumlah Dokumen Perencana an Perangkat Daerah	8 dokumen		DAU	3.500.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dokumen	4.000.000	

	01	201	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Purwareja Klampok	5 laporan	3.500.000	DAU	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	4.000.000
	01	202		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Kec. Purwareja Klampok		2.002.184.336	DAU			2.051.480.000
	01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Purwareja Klampok	18 orang/bulan	1.950.704.336	DAU	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	8 orang/bulan	2.000.000.000
	01	202	03	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Tersedianya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Purwareja Klampok	12 dokumen	45.480.000	DAU	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	45.480.000

	01	202	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7 laporan	Kec. Purwareja Klampok			7 laporan	6.000.000	DAU		Jumlah Laporan Keuangan bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7 laporan	6.000.000
	01	206		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah			Kec. Purwareja Klampok		115.000.000		113.000.000	DAU				
	01	206	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	Kec. Purwareja Klampok		5.000.000	1 paket	5.000.000	DAU		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	5.000.000

		01	206	02	Penyediaan dan Peralatan Perengkap Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	Kec. Purwareja Klampok		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	25.000.000	DAU		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	25.000.000
		01	206	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 paket	Kec. Purwareja Klampok		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 paket	83.000.000	DAU		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 paket	83.000.000
		01	207		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Kec. Purwareja Klampok				684.000.000	DAU				684.000.000
		01	207	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 unit	Kec. Purwareja Klampok		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 unit	43.000.000	DAU		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 unit	43.000.000
		01	207	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 unit	Kec. Purwareja Klampok		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 unit	45.000.000	DAU		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 unit	45.000.000

	01	207	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	3 unit	Kec. Purwareja Klampok		Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	3 unit	0	DAU		Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	3 unit	46.000.000
	01	207	09	Pengadaan kantor Gedung atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 unit	Kec. Purwareja Klampok		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 unit	300.000.000	DAU		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 unit	400.000.000
	01	207	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 unit	Kec. Purwareja Klampok		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 unit	95.000.000	DAU		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 unit	150.000.000
	01	208		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Kec. Purwareja Klampok				56.234.720	DAU				57.234.720

	01	208	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan	Kec. Purwareja Klampok		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan	15.000.000	DAU		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan	16.000.000
	01	208	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 laporan	Kec. Purwareja Klampok		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 laporan	41.234.720	DAU		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 laporan	41.234.720
	01	209		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Kec. Purwareja Klampok				270.000.000	DAU				390.000.000
	01	209	02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak perizinan kendaraan operasional lapangan	Tersedianya jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 unit	Kec. Purwareja Klampok		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 unit	30.000.000	DAU		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 unit	40.000.000

		01	209	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	Kec. Purwareja Klampok		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	200.000.000	DAU		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	300.000.000
		01	209	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	Kec. Purwareja Klampok		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	40.000.000	DAU		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	50.000.000
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase terlaksananya program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			Kec. Purwareja Klampok	100%			120.100.000	DAU		Persentase terlaksananya program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	111.500.000
7	01	02	204		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Limpahkan Kepada Camat	Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Limpahkan Kepada Camat			Kec. Purwareja Klampok				110.100.000	DAU				111.500.000

7	01	02	204	02	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan perjanjian	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	1 laporan	Kec. Purwareja Klampok		Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	1 laporan	5.000.000	DAU		Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	1 laporan	6.000.000
7	01	02	204	01	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan perjanjian non usaha	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	2.000 dokumen	Kec. Purwareja Klampok		Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	2.000 dokumen	5.100.000	DAU		Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	2.000 dokumen	5.500.000
7	01	02	204	03	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (jumlah SPPT yang tersalurkan ke WP)	1 laporan	Kec. Purwareja Klampok		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 laporan	100.000.000	DAU		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 laporan	100.000.000
					Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum								10.000.000					

7	01	03	201	01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 lembaga kemasyarakatan	5.000.000	DAU	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 lembaga kemasyarakatan	6.000.000
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya program penyelenggaraan pemerintahan umum	Persentase terlaksananya program penyelenggaraan pemerintahan umum	100%	20.000.000	DAU	Persentase terlaksananya program penyelenggaraan pemerintahan umum	100%	20.000.000
7	01	05	201		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sesuai Penugasan Kepala Daerah	Tertaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sesuai Penugasan Kepala Daerah			20.000.000	DAU			20.000.000
7	01	05	201	08	Pelaksanaan tugas koordinasi pimpinan wilayah kecamatan	Tertaksananya tugas koordinasi pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 dokumen	20.000.000	DAU	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 dokumen	20.000.000
										DAU			

7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terlaksananya program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		Kec. Purwareja Klampok	100%			286.250.000	DAU		Persentase terlaksananya program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%	325.000.000
7	01	06	201		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Kec. Purwareja Klampok				286.250.000	DAU				325.000.000
7	01	06	201	01	Fasilitasi penyusunan peraturan dan peraturan kepala desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kec. Purwareja Klampok		4 dokumen	4 dokumen	20.000.000	DAU		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	4 dokumen	25.000.000
7	01	06	201	02	Fasilitasi administrasi pemerintahan desa	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Pemerintahan Desa	Kec. Purwareja Klampok		8 dokumen	8 dokumen	56.250.000	DAU		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8 dokumen	60.000.000

					Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 dokumen	25.000.000	DAU		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 dokumen	25.000.000
7	01	06	201	03	Fasilitasi pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	8 dokumen	15.000.000	DAU		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	8 dokumen	20.000.000
7	01	06	201	09	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan pembangunan desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan pembangunan desa	8 dokumen	20.000.000	DAU		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan pembangunan desa	8 dokumen	25.000.000
7	01	06	201	11	Fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	8 dokumen	20.000.000	DAU		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	8 dokumen	25.000.000

7	01	06	201	16	Fasilitasi penyusunan program pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Tertaksana nya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan	8 dokumen	Kec. Purwareja Klampok		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan	8 dokumen	50.000.000	DAU		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Masyarakat Desa	8 dokumen	55.000.000
7	01	06	201	17	Kordinasi pendampingan desa wilayahnya	Tertaksana nya di Kordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Kordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	8 laporan	Kec. Purwareja Klampok		Jumlah Laporan Hasil Kordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	8 laporan	80.000.000	DAU		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	8 laporan	90.000.000

CAMAT PURWAREJA KLAMPOK

SONHAJI, S. IP. S. Sos. M. Kes

Pembina Tk. I

NIP. 19660626 198702 1 002

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program pada perangkat daerah merupakan program prioritas dalam Renstra 2023-2026. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPD selanjutnya dijabarkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan. Pemilihan untuk masing-masing program/ kegiatan di
Sebagai berikut :

Pertama Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota dengan dengan 6 Kegiatan: antara lain 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah 2 (dua) Sub Kegiatan 2)Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan tiga sub Kegiatan antara lain Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD; 3)Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan 3 Sub Kegiatan 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan 2 Sub Kegiatan 5)Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan 5 Sub Kegiatan 6)Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 3 Sub Kegiatan. Kedua Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan 2 (dua) Kegiatan yaitu Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat dengan 3 Sub Kegiatan dan Kegiatan Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum dengan 1 sub kegiatan. Ketiga Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan 1 (satu) Kegiatan yaitu Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan 1 Sub Kegiatan. Keempat Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan satu Kegiatan yaitu Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

dengan 1 Sub Kegiatan. Kelima Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan 1 Kegiatan yaitu Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan 7 Sub Kegiatan.

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2022-2026. Renja Perangkat Daerah selanjutnya menjadi platform operasional bagi Perangkat Daerah dalam menjalankan programnya dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan daerah tahun 2022-2026. Berkaitan dengan hal-hal tersebut, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah setelah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024 dan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disepakati.
2. Kerangka pendanaan dalam Renja Perangkat Daerah masih bersifat sementara, sehingga masih dimungkinkan terjadi perubahan pagu yang disebabkan oleh pengurangan, penambahan, dan pergeseran anggaran antar program, antar kegiatan maupun antar sub kegiatan dalam kerangka penyusunan anggaran secara terpadu dan berbasis kinerja.

3. Renja Perangkat Daerah menjadi acuan bagi Kepala Perangkat Daerah dan segenap jajarannya serta pemangku kepentingan lainnya untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, serta menjadi dasar dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal : Maret 2023

CAMAT PURWAREJA KLAMPOK



SONHAJO, S.I.P.S. Sos. M. Kes
Pembina

NIP. 19660626-198702 1 002